

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN "ALKES"
DI DEPARTEMEN KESEHATAN RI
(Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)**

TESIS

Oleh:
LIZA PEBRIYENTI
201520251007



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi
Dalam Pengadaan Alat Kesehatan "ALKES"
di Departemen Kesehatan RI (Putusan Nomor
: 30/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jkt.Pst)**

Nama Mahasiswa : Liza Pebriyenti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520251007

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

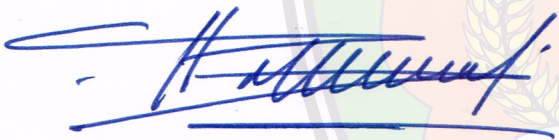
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Mei 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH
NIDN : 0311026802


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi
Dalam Pengadaan Alat Kesehatan "ALKES"
di Departemen Kesehatan RI (Putusan
Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jkt.Pst)**

Nama Mahasiswa : Liza Pebriyenti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201520251007

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 8 Mei 2018

Jakarta, Mei 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM
NIDN : 0323015604

Penguji II : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH
NIDN : 0323035802

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN: 0312117102

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan "ALKES" di Departemen Kesehatan RI (Putusan Nomor : 30 / Pid. Sus / TPK / 2017 / PN. Jkt. Pst).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

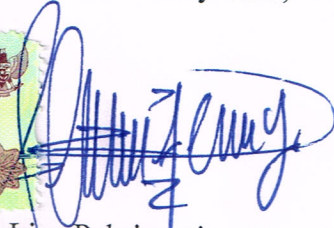
Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Mei 2018

Yang Membuat Pernyataan,




Liza Pebriyenti
201520251007

ABSTRAK

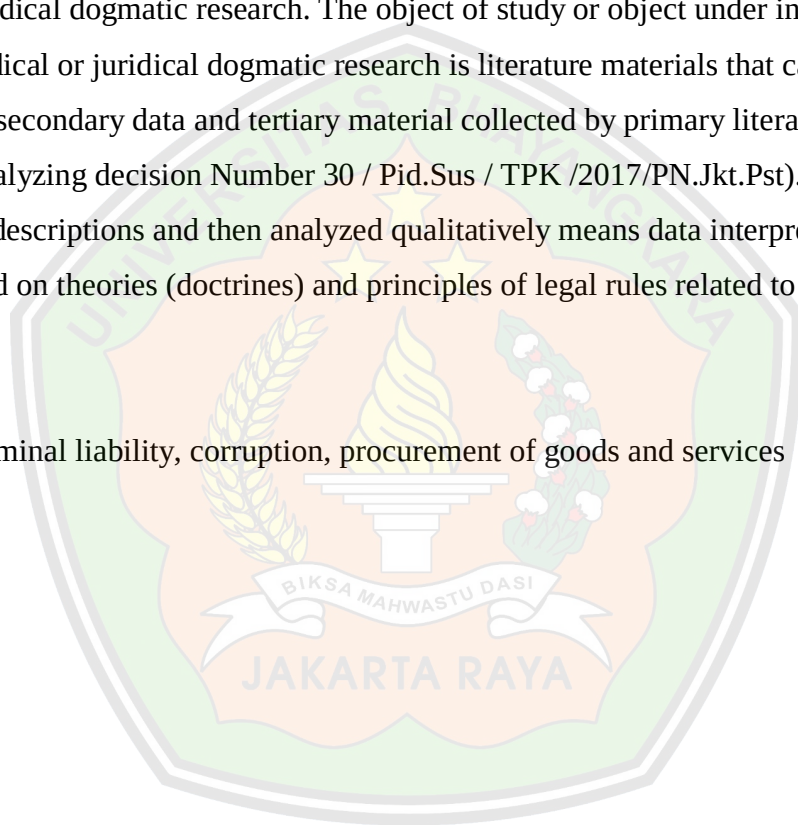
Liza Febrienty. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan “ALKES” di Departemen Kesehatan RI (Studi Kasus Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat). Tujuan penulis meneliti mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengadaan Alkes oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengadaan Alkes oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan untuk mengetahui apakah perbuatan yang layak / seharusnya dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan Alkes tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian yuridis dogmatis. Objek kajian atau objek yang diteliti dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian yuridis dogmatis adalah bahan – bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. data primer diperoleh dengan cara menganalisis putusan Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst). data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif artinya data ditafsirkan dan diskusikan berdasarkan teori – teori (doktrin) dan asas – asas peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, korupsi, pengadaan barang dan jasa.

ABSTRACT

Liza Febrienty. Corruption Crime Procurement Procurement of Medical Devices "ALKES" in the Ministry of Health (Case Study of Corruption Court of Central Jakarta. The purpose of the authors examine how corruption criminal liability in the procurement of Alkes by the Minister of Health of the Republic of Indonesia is to describe and analyze the extent of corruption criminal liability in the procurement of Alkes by the Minister of Health of the Republic of Indonesia and to find out whether the appropriate / should be sought criminal liability in the procurement of the Alkes .This type of research is normative juridical law research or juridical dogmatic research. The object of study or object under investigation in normative juridical or juridical dogmatic research is literature materials that can be categorized as secondary data and tertiary material collected by primary literature study. Data obtained by analyzing decision Number 30 / Pid.Sus / TPK /2017/PN.Jkt.Pst). data arranged in the form of descriptions and then analyzed qualitatively means data interpreted and discussed based on theories (doctrines) and principles of legal rules related to the subject matter.

Keywords: Criminal liability, corruption, procurement of goods and services



KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia –Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal tesis berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat Kesehatan “ALKES” di Departemen Kesehatan RI (Putusan Nomor : 30/Pid. Sus/ TPK/2017/PN.Jkt.Pst)

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH.,M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Bapak Dr. Boy Nurdin,SH.,MH. Selaku Pembimbing Satu yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam penulisan proposal tesis ini, serta memberikan koreksi dan masukan yang sangat berharga ,sehingga proposal tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH., selaku Pembimbing Dua yang penuh perhatian dan ketulusan memberikan koreksi teknis dalam penulisan proposal tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Keluarga tercinta, Para rekan dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan proposal tesis ini.

Harapan peniliti kiranya, proposal tesis ini dapat menjadi sedikit sumbangan yang berharga bagi ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Jakarta, Mei 2018
Mahasiswa Pascasarjana
Magister Ilmu Hukum

LIZA PEBRIYENTI
201520251007

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
LAMPIRAN.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	10
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	10
1.2.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	14
1.4 Kerangka Teori,Kerangka Konsepsional dan Kerangka Berpikir.....	15
1.4.1 . Kerangka teori.....	15
1. Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	15
2. Teori Pidana.....	23
3. Teori Keadilan.....	28
1.4.2. Krangka Konsepsional.....	33
1. Tindak Pidana Korupsi.....	33
2. Pengadaan Barang dan Jasa.....	38
1.4.2 . Kerangka Pemikiran.....	51
1.5 Metode Penelitian.....	52
1.6 Sistematika Tulisan.....	53

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	57
2.1	Pengertian Korupsi.....	57
2.2	Tindak Pidana Korupsi di Luar KUHP.....	63
2.3	Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP.....	72
2.4	Penyalahgunaan Wewenang.....	74
2.5	Pengertian Sifat Melawan Hukum.....	84
2.6	Jenis – Jenis Sifat atau Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.	85
2.7	Jenis Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	89
2.8	Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.....	97
BAB III	KRITERIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN.....	103
3.1	Kriteria Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan Alkes.....	103
3.2	Kriteria Obyektif dan Subyektif.....	105
3.3	Kriteria Orang Yang Bertanggung Jawab Dalam Kehidupan Sehari-hari.....	106
3.4	Kriteria Menjadi Pemimpin atau Pejabat Aparatur Sipil Negara.....	107
BAB IV	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALKES OLEH MENKES RI.....	109
4.1	Kasus.....	109
4.2	Kronologis Kasus.....	109
4.3	Terpidana.....	118
4.4	Perbuatan Melawan Hukum.....	118
4.5	Tuntutan Pidana.....	122
IV.6	Penjatuhan Pidana.....	124
BAB V	PENUTUP.....	126
5.1	Kesimpulan.....	126
5.2	Saran.....	131
BAB VI	DAFTAR PUSTAKA.....	133
	CURICULUM VITAE.....	138
	LAMPIRAN	139